Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 7 No.6 Tahun 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

HUBUNGAN INDONESIA-TIONGKOK DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN DIPLOMASI EKONOMI: ANALISIS *BELT AND ROAD INITIATIVE*

Khairul Ahyadi
Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina

ARTICLEINFO

Article history:
Received: February 2025
Revised: February 2025
Accepted: February 2025
Available online

Korespondensi: Email:
[1]ahyadifuture@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

This article analyzes Indonesia-China relations from the perspective of public policy and economic diplomacy with a focus on the implementation of the Belt and Road Initiative (BRI). Indonesia has a strategic role in the Belt and Road Initiative (BRI) initiated by China. As one of the main partners, Indonesia benefits from investment and infrastructure development supported by the BRI. However, this cooperation also poses challenges, especially related to public policy regulations, transparency, and long-term impacts on the national economy. Using a qualitative approach based on literature studies, this article analyzes how Indonesian public policy responds to BRI investments. The Indonesian government has adopted various strategies to maximize the benefits of this cooperation, such as encouraging infrastructure projects that are in line with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and improving foreign investment regulations to remain profitable for domestic interests. In addition, the dimensions of economic diplomacy in Indonesia-China cooperation have also developed, covering the sectors of trade, infrastructure, and economic security. The BRI has become an important tool in strengthening bilateral relations, although it has also raised concerns regarding economic dependence and imbalances in the trade balance. Therefore, adaptive public policies and careful economic diplomacy strategies are needed so that Indonesia can optimize the benefits of this cooperation. With in-depth analysis, this study provides insights into the implications of policy and economic diplomacy in the implementation of BRI in Indonesia.

***Keywords**: Public Policy, Economic Diplomacy, Belt and Road Initiative.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis hubungan Indonesia-Tiongkok dalam perspektif kebijakan publik dan diplomasi ekonomi dengan fokus pada implementasi *Belt and Road Initiative* (BRI). Indonesia memiliki peran strategis dalam *Belt and Road Initiative* (BRI) yang digagas oleh Tiongkok. Sebagai salah satu mitra utama, Indonesia memperoleh manfaat dari investasi dan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh BRI. Namun, kerja sama ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan regulasi kebijakan publik, transparansi, serta dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini menganalisis bagaimana kebijakan publik Indonesia merespons investasi BRI. Pemerintah Indonesia mengadopsi berbagai strategi untuk memaksimalkan keuntungan dari kerja sama ini, seperti mendorong proyek infrastruktur yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka

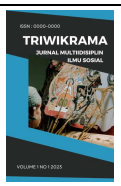

Menengah Nasional (RPJMN) dan meningkatkan regulasi investasi asing agar tetap menguntungkan bagi kepentingan domestik. Selain itu, dimensi diplomasi ekonomi dalam kerja sama Indonesia-Tiongkok juga berkembang, mencakup sektor perdagangan, infrastruktur, dan keamanan ekonomi. BRI menjadi alat penting dalam memperkuat hubungan bilateral, meskipun juga menimbulkan kekhawatiran terkait ketergantungan ekonomi serta keseimbangan dalam neraca perdagangan. Oleh karena itu, kebijakan publik yang adaptif dan strategi diplomasi ekonomi yang cermat diperlukan agar Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat dari kerja sama ini. Dengan analisis yang mendalam, studi ini memberikan wawasan mengenai implikasi kebijakan dan diplomasi ekonomi dalam implementasi BRI di Indonesia.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Diplomasi Ekonomi, *Belt and Road Initiative.*

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam bidang ekonomi. Kemitraan strategis ini semakin diperkuat melalui inisiatif global *Belt and Road Initiative* (BRI), yang diluncurkan oleh Tiongkok pada tahun 2013. BRI bertujuan untuk meningkatkan konektivitas ekonomi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menjadi salah satu mitra utama di Asia Tenggara. Dengan posisi geografis yang strategis sebagai poros maritim dunia, Indonesia memainkan peran penting dalam jalur maritim BRI, yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik, Timur Tengah, hingga Eropa (Paramitha, 2024).

Sebagai bagian dari implementasi BRI, Indonesia telah menerima berbagai bentuk investasi langsung asing (FDI) dari Tiongkok dalam sektor-sektor kunci seperti pembangunan infrastruktur, energi, industri manufaktur, dan perdagangan. Sejumlah proyek besar, seperti pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Industri Morowali, serta pengembangan pelabuhan dan jalan tol, menunjukkan bagaimana kerja sama ini berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks perdagangan, volume ekspor dan impor antara kedua negara terus meningkat, dengan Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Mahroza et al., 2024).

Namun, meskipun kerja sama ini menawarkan berbagai keuntungan, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam implementasi kebijakan publik terkait BRI. Transparansi dalam perjanjian investasi, keberlanjutan utang luar negeri, serta dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal menjadi isu yang sering diperdebatkan. Beberapa pihak mengkhawatirkan ketergantungan Indonesia terhadap investasi Tiongkok, yang berpotensi mempengaruhi kedaulatan ekonomi dan stabilitas fiskal negara. Selain itu, aspek lingkungan dan dampak sosial dari proyek-proyek BRI juga menjadi perhatian, terutama dalam hal perizinan lahan, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta keberlanjutan ekosistem (Santoso, 2023).

Dalam konteks diplomasi ekonomi, kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam kerangka BRI juga menghadirkan dinamika tersendiri. Di satu sisi, hubungan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonominya melalui modernisasi infrastruktur dan peningkatan investasi. Di sisi lain, Indonesia perlu mengadopsi kebijakan yang adaptif dan strategis agar dapat mengelola hubungan bilateral ini secara berimbang, tanpa mengorbankan

kepentingan nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan publik dan diplomasi ekonomi dalam implementasi BRI di Indonesia menjadi sangat relevan untuk memahami dampak kerja sama ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta posisi strategis Indonesia dalam peta ekonomi global.

Melalui penelitian ini, akan dianalisis bagaimana kebijakan publik Indonesia merespons investasi dan proyek infrastruktur BRI, serta bagaimana diplomasi ekonomi berperan dalam mengelola hubungan bilateral dengan Tiongkok. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implikasi kebijakan dan strategi diplomasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat dari kerja sama ini, sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang muncul.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) dan dampaknya terhadap kebijakan publik serta diplomasi ekonomi Indonesia. Metode ini memfokuskan pada analisis berbagai sumber tertulis yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, serta dokumen resmi dari kedua negara yang terkait dengan BRI dan kerja sama bilateral. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai konsep, pola, dan dinamika yang relevan dengan topik penelitian, terutama dalam konteks pengelolaan kebijakan ekonomi dan diplomasi Indonesia. Dalam hal ini, literatur yang digunakan akan mencakup analisis terkait kebijakan investasi asing, transparansi proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok, serta pengelolaan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok melalui BRI. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ini akan digunakan untuk mengevaluasi dampak kerja sama BRI terhadap ekonomi Indonesia, baik dari segi pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji secara kritis penerapan prinsip-prinsip diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan yang muncul dari proyek-proyek BRI. Fokus utama adalah untuk menilai apakah kebijakan Indonesia sudah sesuai dengan kepentingan nasional, terutama dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan politik. Peneliti juga akan mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan meningkatkan partisipasi sektor swasta domestik, serta bagaimana Indonesia mengelola potensi risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap investasi Tiongkok. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperkuat posisi negara di kancah internasional, khususnya dalam menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Berdasarkan analisis literatur yang ada, penelitian ini akan menyoroti berbagai kebijakan yang perlu diperkuat untuk memaksimalkan potensi kerja sama dengan Tiongkok dalam kerangka BRI, sehingga dapat

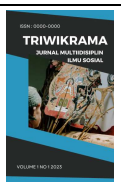

memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

LANDASAN TEORITIS

Hubungan Indonesia-Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) telah menjadi topik yang menarik untuk dianalisis dalam konteks kebijakan publik dan diplomasi ekonomi. Indonesia sebagai salah satu mitra utama Tiongkok dalam BRI menghadapi berbagai peluang dan tantangan dalam kerja sama ini. Implementasi kebijakan publik yang terkait dengan proyek-proyek BRI mencakup berbagai aspek seperti percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi kebijakan investasi, serta penguatan kerja sama bilateral dalam perdagangan dan keamanan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi, seperti transparansi proyek, keberlanjutan utang, serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal. Salah satu contoh konkret adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mencerminkan kompleksitas koordinasi antar-lembaga dan tantangan dalam implementasi proyek infrastruktur berskala besar.

Dalam aspek diplomasi ekonomi, hubungan Indonesia-Tiongkok terus berkembang melalui berbagai perjanjian perdagangan dan investasi yang berfokus pada peningkatan ekspor serta kerja sama di sektor strategis seperti energi dan pertahanan. Meskipun demikian, tantangan geopolitik seperti sengketa di Laut Natuna Utara tetap menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika kerja sama kedua negara. Keamanan ekonomi juga menjadi perhatian dalam kerja sama pengadaan barang dan jasa, di mana dominasi perusahaan Tiongkok dalam proyek-proyek strategis menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap industri domestik Indonesia.

Dari perspektif teoretis, analisis hubungan Indonesia-Tiongkok dalam BRI dapat dijelaskan melalui berbagai teori dalam kebijakan publik, diplomasi ekonomi, serta hubungan internasional. Pendekatan institusional dalam kebijakan publik membantu memahami bagaimana pemerintah Indonesia merespons investasi dan proyek infrastruktur BRI. Sementara itu, teori ketergantungan ekonomi dapat menjelaskan potensi ketidakseimbangan dalam hubungan bilateral yang dapat mempengaruhi kedaulatan ekonomi Indonesia. Selain itu, teori realisme dalam hubungan internasional relevan dalam memahami strategi diplomasi yang digunakan kedua negara untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya masing-masing.

Kesimpulannya, kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam BRI memiliki dampak yang luas terhadap kebijakan publik, diplomasi ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun memberikan manfaat besar dalam hal investasi dan pembangunan infrastruktur, tantangan yang terkait dengan transparansi, keberlanjutan utang, serta dampak sosial ekonomi harus terus diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih adaptif dan strategi diplomasi yang lebih seimbang diperlukan untuk memastikan bahwa kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional Indonesia.

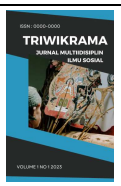

HASIL DAN DISKUSI

Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan oleh Tiongkok pada 2013 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa melalui jalur darat dan laut. Indonesia, dengan posisi strategisnya di Asia Tenggara dan kebutuhan besar akan pembangunan infrastruktur, menjadi salah satu negara yang terlibat dalam inisiatif ini. Melalui proyek-proyek besar yang didanai oleh BRI, Indonesia berharap dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memfasilitasi perdagangan, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Meskipun banyak peluang yang ditawarkan oleh BRI, Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasinya, baik dari segi kebijakan publik, diplomasi ekonomi, maupun dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan publik Indonesia merespons BRI, serta dampak yang ditimbulkan oleh proyek-proyek tersebut dalam konteks ekonomi dan sosial (Mahroza et al., 2024; Yamin & Windymadaksa, 2017).

Sejarah dan Latar Belakang BRI di Indonesia

Belt and Road Initiative pertama kali dipromosikan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama antar negara melalui pembangunan infrastruktur. Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki kepentingan besar dalam keberhasilan proyek-proyek BRI. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Indonesia melihat BRI sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka peluang investasi yang lebih besar. Proyek-proyek yang didanai oleh BRI, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri, dan pengembangan pelabuhan, merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memodernisasi infrastruktur dan meningkatkan daya saing global (Yamin & Windymadaksa, 2017).

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Merespons BRI

Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan manfaat dari keterlibatannya dalam BRI. Salah satu kebijakan utama yang dijalankan adalah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada proyek-proyek besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang terhubung dengan proyek infrastruktur lainnya di berbagai wilayah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan efisiensi logistik. Selain itu, Indonesia berupaya meningkatkan aliran investasi asing, khususnya dari Tiongkok, dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, termasuk reformasi kebijakan regulasi yang bertujuan untuk mempermudah prosedur dan menarik lebih banyak investor asing (Mahroza et al., 2024; Paramitha, 2024). Pemerintah juga berupaya memperbaiki regulasi yang mengatur partisipasi sektor swasta domestik dalam proyek-proyek BRI, dengan harapan bahwa keuntungan dari proyek-proyek ini dapat lebih merata dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan untuk menyikapi BRI dengan penuh pertimbangan. Beberapa kebijakan penting yang diambil adalah:

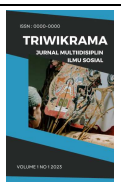

1. Pembangunan Infrastruktur**:** Indonesia memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung**,** jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri merupakan bagian dari upaya ini. Pemerintah Indonesia memandang proyek BRI sebagai cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Regulasi dan Kebijakan Investasi**:** Pemerintah Indonesia menyesuaikan kebijakan untuk meningkatkan aliran investasi asing, khususnya dari Tiongkok. Reformasi kebijakan dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi dengan mengurangi hambatan birokrasi dan mempermudah prosedur izin investasi, sehingga menarik investor asing, khususnya dalam proyek-proyek BRI (Amanda, 2021).
3. Kerjasama Ekonomi yang Berkelanjutan**:** Indonesia juga memperhatikan keberlanjutan dalam menjalin kerjasama dengan Tiongkok melalui pembaruan regulasi dan peningkatan kesepahaman bilateral mengenai manfaat bersama yang dapat diperoleh, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Tantangan dalam Pengelolaan Proyek BRI

Meski banyak kebijakan yang telah diterapkan, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan proyek-proyek BRI. Salah satunya adalah ketidakseimbangan pengaruh ekonomi dan teknologi antara Indonesia dan Tiongkok. Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi yang lebih maju dan teknologi yang lebih berkembang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah proyek-proyek yang dibiayai oleh BRI, yang dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada Tiongkok. Selain itu, sebagian besar proyek BRI di Indonesia dibiayai dengan utang, yang berisiko membebani fiskal negara dalam jangka panjang jika tidak dikelola dengan hati-hati. Salah satu contoh konkrit dari tantangan ini adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang menghadapi berbagai hambatan teknis dan administratif yang menghambat kelancaran pelaksanaan. Koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam proyek-proyek besar ini sering kali menjadi kendala, mengingat kompleksitas dan skala proyek yang sangat besar (Rakhmat et al., 2020; Yamin & Windymadaksa, 2017). Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi proyek-proyek BRI antara lain:

1. Ketergantungan pada Utang**:** Sebagian besar pembiayaan proyek-proyek BRI menggunakan utang, yang berisiko membebani anggaran negara dalam jangka panjang. Pemerintah perlu mengelola utang dengan hati-hati untuk menghindari dampak fiskal negatif, seperti penurunan daya beli masyarakat dan krisis ekonomi akibat pembayaran utang yang berlebihan (Paramitha, 2024).
2. Koordinasi Lembaga yang Buruk**:** Proyek-proyek besar membutuhkan koordinasi antara banyak lembaga pemerintahan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengatur Jalan Tol. Ketidakselarasan dalam kebijakan antar lembaga tersebut seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan proyek (Rakhmat et al., 2020).

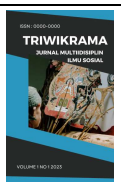

3. Resistensi Masyarakat dan Isu Sosial**:** Beberapa proyek BRI menimbulkan resistensi dari masyarakat, terutama terkait dengan konflik lahan, keberpihakan pada pekerja asing, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Proyek seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memunculkan kontroversi mengenai pembebasan lahan dan pemberian lapangan pekerjaan kepada pekerja lokal (Wicaksono, 2023).

Peran Diplomasi Ekonomi dalam Hubungan Bilateral

Diplomasi ekonomi menjadi kunci dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Indonesia berupaya memperkuat kerjasama ekonomi dengan Tiongkok melalui berbagai perjanjian perdagangan yang menguntungkan kedua negara. Salah satu sektor yang mendapat perhatian utama adalah ekspor produk Indonesia ke Tiongkok, dengan komoditas utama seperti minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu produk ekspor terbesar Indonesia. Selain sektor perdagangan, Indonesia juga berupaya memperluas kerja sama dengan Tiongkok dalam bidang lain seperti pendidikan, penelitian, dan budaya, yang turut mempererat hubungan antara kedua negara (Amanda, 2021; Paramitha, 2024).

Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia

Sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi, Indonesia berusaha untuk memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan dengan Tiongkok. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui negosiasi perdagangan untuk membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia di pasar Tiongkok. Selain itu, Indonesia juga berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Tiongkok dengan mengembangkan strategi diversifikasi ekspor, yang bertujuan untuk mencari pasar baru bagi produk-produk Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia juga fokus pada perbaikan kualitas produk dan daya saing agar lebih kompetitif di pasar global (Cantika et al., 2024). Di sisi lain, Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek perdagangan, tetapi juga pada kerja sama di sektor lain seperti pertahanan dan keamanan ekonomi, untuk menjaga stabilitas regional dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama bilateral (Nugraha & Astri, 2023). Indonesia mengembangkan beberapa strategi utama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari BRI, antara lain:

1. Diversifikasi Ekspor**:** Salah satu prioritas utama diplomasi ekonomi Indonesia adalah diversifikasi pasar ekspor. Meskipun Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, Indonesia berupaya memperkenalkan produk-produk lokal yang lebih beragam ke pasar Tiongkok, termasuk produk pertanian dan hasil manufaktur (Paramitha, 2024).
2. Kerjasama Sektor Infrastruktur dan Teknologi**:** Indonesia memanfaatkan kerjasama dengan Tiongkok dalam sektor teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sektor industri dalam negeri. Sebagai contoh, Indonesia terlibat dalam proyek-proyek teknologi tinggi yang akan meningkatkan kualitas infrastruktur di bidang transportasi dan logistik (Yamin & Windymadaksa, 2017).
3. Perjanjian Bilateral dan Multilateral**:** Indonesia juga berusaha memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan melalui perjanjian perdagangan bilateral dengan Tiongkok dan memperluas kerjasama dalam forum multilateral seperti APEC, yang mencakup berbagai sektor, mulai dari energi hingga pengembangan sumber daya manusia.

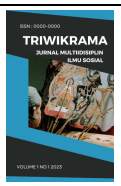

Tantangan Geopolitik dan Keamanan Ekonomi

Geopolitik menjadi tantangan besar dalam hubungan Indonesia-Tiongkok, salah satunya terkait dengan sengketa Laut Natuna Utara yang melibatkan klaim teritorial antara Indonesia dan Tiongkok. Sengketa ini berpotensi menimbulkan ketegangan yang memengaruhi stabilitas hubungan kedua negara, termasuk dalam aspek perdagangan dan investasi. Tiongkok, sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan militernya, memiliki pengaruh besar terhadap hubungan bilateral, sementara Indonesia berusaha menjaga kedaulatan wilayahnya di Laut Natuna Utara. Selain itu, Indonesia juga menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing dan perlindungan terhadap industri domestik, yang sering kali terancam oleh dominasi perusahaan-perusahaan besar Tiongkok di berbagai sektor ekonomi (Adikara & Munandar, 2021; Rakhmat et al., 2020).

Perlindungan Industri Domestik

Dalam kerangka diplomasi ekonomi, Indonesia perlu memastikan bahwa keterbukaan terhadap investasi asing tidak mengorbankan kepentingan nasional, terutama dalam melindungi industri domestik. Tiongkok sebagai negara dengan investasi terbesar di Indonesia berpotensi mendominasi sektor-sektor tertentu, seperti infrastruktur dan manufaktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu merancang kebijakan yang memungkinkan partisipasi sektor swasta domestik dalam proyek-proyek BRI, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal. Perlindungan terhadap industri domestik juga menjadi penting untuk menjaga kemandirian ekonomi Indonesia, agar tidak terlalu bergantung pada investasi asing yang dapat menimbulkan ketergantungan jangka panjang (Pratama, 2018; Nugraha & Astri, 2023).

Dampak Ekonomi Proyek BRI

Proyek-proyek yang dibiayai oleh BRI memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak positif yang paling terasa adalah peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, mempermudah perdagangan, dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pengembangan pelabuhan, dan jalan tol diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi kemacetan, dan memperbaiki kualitas transportasi di Indonesia. Selain itu, proyek-proyek ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur. Peningkatan investasi asing yang datang melalui proyek-proyek BRI juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang dapat memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang (Paramitha, 2024; Rakhmat et al., 2020). Proyek-proyek yang didanai oleh BRI memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, antara lain:

1. Peningkatan Infrastruktur**:** Proyek-proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung**,** jalan tol, dan pelabuhan akan meningkatkan efisiensi transportasi, yang pada gilirannya mendukung distribusi barang yang lebih cepat dan lebih murah. Ini akan mendongkrak pertumbuhan sektor logistik, meningkatkan perdagangan, dan mengurangi biaya ekonomi (Paramitha, 2024).

2. Penciptaan Lapangan Kerja**:** Proyek-proyek besar akan menciptakan lapangan kerja, baik langsung melalui konstruksi dan operasional, maupun tidak langsung melalui sektor pendukung seperti perhotelan, transportasi, dan perdagangan. Ini akan memberi kontribusi positif terhadap pengurangan angka pengangguran di Indonesia.
3. Peningkatan Investasi Asing**:** Indonesia juga mendapatkan keuntungan dalam bentuk aliran investasi asing langsung (FDI) dari Tiongkok, yang berpotensi mendukung pembangunan industri dalam negeri, memperkenalkan teknologi baru, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global.

Hambatan Sosial dalam Proyek BRI

Namun, proyek-proyek BRI juga menimbulkan sejumlah hambatan sosial yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketimpangan tenaga kerja, di mana banyak proyek besar yang melibatkan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok. Hal ini sering menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan dalam mendapatkan kesempatan kerja. Konflik lahan juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan proyek-proyek besar, karena sering kali melibatkan ekspropriasi tanah yang berpotensi menimbulkan protes dari masyarakat yang terdampak. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proyek BRI ini perlu ditangani dengan hati-hati untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak menciptakan ketegangan sosial di masyarakat (Rachmayanti, 2014; Pratama, 2018). Beberapa dampak sosial yang perlu diperhatikan:

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi**:** Meski banyak yang mendapatkan manfaat dari proyek BRI, sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, merasa terpinggirkan. Ketimpangan antara wilayah yang mendapatkan keuntungan dari proyek besar dan wilayah lainnya bisa menciptakan ketidakpuasan sosial (Wicaksono, 2023).
2. Isu Tenaga Kerja**:** Banyak proyek BRI yang melibatkan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok, yang dapat menimbulkan ketegangan sosial di kalangan pekerja lokal. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif agar lebih banyak pekerja Indonesia yang terlibat dalam proyek-proyek ini.
3. Dampak Lingkungan**:** Pembangunan infrastruktur besar sering kali mempengaruhi lingkungan, baik dalam bentuk penggundulan hutan, polusi, atau kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, proyek-proyek BRI harus direncanakan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut tidak merusak keberlanjutan ekosistem lokal.

Dampak Lingkungan dari Proyek BRI

Selain dampak ekonomi dan sosial, dampak lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI. Pembangunan infrastruktur berskala besar sering kali melibatkan eksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak ekosistem lokal. Sebagai contoh, proyek-proyek yang melibatkan pembangunan jalan tol, kereta api, dan pelabuhan sering kali memerlukan penggalian lahan dan penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang

memastikan bahwa proyek-proyek BRI mematuhi standar lingkungan yang ketat dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang (Wicaksono, 2023).

Menjaga Keberlanjutan Fiskal dan Ekonomi

Untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan ekonomi dalam pelaksanaan proyek-proyek yang didanai oleh *Belt and Road Initiative* (BRI), Indonesia harus memiliki kebijakan fiskal yang sangat hati-hati dan berkesinambungan. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah memperkuat partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek BRI. Dengan meningkatkan partisipasi sektor swasta, baik domestik maupun asing, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang dapat membebani anggaran negara dalam jangka panjang. Partisipasi sektor swasta dapat membantu mendorong pendanaan melalui skema *Public-Private Partnerships* (PPP), yang memungkinkan pihak swasta untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah.

Selain itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan utang yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Pengelolaan utang yang bijaksana dan transparan akan mengurangi risiko terjadinya krisis utang di masa depan. Pemerintah harus memprioritaskan utang yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi dan *monitoring* terhadap penggunaan utang secara teratur menjadi hal yang sangat penting, agar beban utang tidak melebihi kapasitas negara dalam membayar kembali kewajiban tersebut.

Selain itu, Indonesia harus memperhatikan pola distribusi manfaat dari proyek-proyek BRI ini. Fokus pada pembangunan yang lebih merata dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat ke infrastruktur yang dibutuhkan adalah kunci untuk mempertahankan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah juga harus memanfaatkan proyek-proyek BRI untuk mendorong transformasi sektor-sektor produktif seperti manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, proyek-proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Memperkuat Koordinasi Antar-Lembaga

Koordinasi antar-lembaga pemerintah menjadi salah satu faktor kunci untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek BRI. Seringkali, proyek besar yang melibatkan banyak pihak menghadapi hambatan administratif yang mempengaruhi efisiensi implementasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan penyederhanaan prosedur administratif dan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan adanya keselarasan dalam pelaksanaan proyek dan menghindari tumpang tindih peraturan yang bisa memperlambat proses implementasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas teknis dan administratif lembaga yang terlibat sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menghadapi tantangan yang muncul dalam pelaksanaan proyek BRI. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lembaga-lembaga tersebut perlu dilakukan agar mereka memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola proyek-proyek besar dan kompleks dengan baik. Pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi inovasi dalam manajemen proyek agar dapat mengidentifikasi cara-cara baru yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sering muncul dalam implementasi proyek infrastruktur.

Transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek BRI juga harus ditingkatkan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyediakan platform yang memungkinkan publik untuk memantau perkembangan proyek secara real-time. Hal ini akan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik dan mencegah praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan negara. Selain itu, transparansi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan proyek-proyek besar tersebut.

Perlindungan Kepentingan Nasional

Perlindungan kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI. Meskipun proyek-proyek ini memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat dari proyek-proyek tersebut dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal dan pelaku usaha domestik. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan partisipasi sektor swasta lokal dalam proyek-proyek BRI. Perusahaan-perusahaan domestik harus diberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses tender dan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan proyek-proyek tersebut. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam perekonomian nasional, tetapi juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kesempatan kerja yang dihasilkan oleh proyek-proyek BRI tidak hanya diberikan kepada tenaga kerja asing, tetapi juga kepada tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja lokal harus menjadi bagian integral dari setiap proyek infrastruktur besar yang dibiayai oleh BRI. Dengan demikian, proyek-proyek tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada penguatan perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Proyek-proyek BRI harus dilaksanakan dengan memperhatikan dampak sosial yang dapat timbul, seperti potensi ketimpangan sosial atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap proyek harus melalui evaluasi dampak sosial dan lingkungan yang komprehensif sebelum dimulai. Proyek-proyek tersebut juga harus memiliki mekanisme untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat lokal, seperti program pemberdayaan masyarakat atau kompensasi bagi mereka yang terkena dampak langsung dari pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan diintegrasikan dalam setiap aspek

perencanaan dan pelaksanaan proyek, agar Indonesia dapat mencapai pembangunan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, keberlanjutan fiskal, koordinasi antar lembaga, dan perlindungan kepentingan nasional merupakan tiga elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan proyek-proyek BRI di Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh BRI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) menghadirkan peluang besar bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kerja sama ini juga menimbulkan tantangan yang kompleks dalam berbagai aspek, terutama terkait dengan kebijakan publik, transparansi, dan keamanan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika hubungan ini, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, kestabilan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam kerja sama ini adalah memastikan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek BRI. Proyek-proyek besar yang didanai oleh Tiongkok sering kali menghadapi masalah terkait dengan alokasi dana, pengadaan barang dan jasa, serta potensi korupsi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek, serta memperkenalkan prosedur yang lebih transparan untuk melibatkan sektor swasta domestik dan publik dalam pengelolaan dana. Transparansi yang lebih tinggi juga akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kerja sama ini dan menghindari potensi dampak negatif yang dapat merugikan Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga harus memperhatikan keseimbangan dalam hubungan bilateralnya dengan Tiongkok agar kerja sama ini tidak hanya menguntungkan dalam aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan nasional. Dalam hal ini, strategi diplomasi ekonomi yang cermat menjadi sangat penting. Diplomasi ekonomi Indonesia harus mampu mengelola hubungan dengan Tiongkok dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga politik dan sosial. Dengan memperhatikan kepentingan nasional, Indonesia dapat memastikan bahwa investasi asing yang masuk tidak hanya membawa manfaat finansial, tetapi juga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia perlu terus meningkatkan kapabilitas domestik dalam mengelola investasi asing, khususnya yang datang dari Tiongkok. Hal ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan proyek BRI, serta penguatan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Peningkatan kapasitas teknis dan manajerial ini akan membantu Indonesia untuk lebih mandiri dalam mengelola proyek-proyek besar dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Selain itu, penguatan regulasi yang mengatur investasi asing, khususnya yang berhubungan dengan kerja

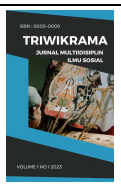

sama BRI, juga perlu diperhatikan. Regulasi yang jelas dan tegas akan memastikan bahwa semua proyek yang dibiayai oleh Tiongkok dapat berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa kerja sama BRI ini tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan harus memprioritaskan keberlanjutan dan dampak sosial dari setiap proyek. Proyek infrastruktur yang didanai oleh BRI harus dirancang untuk tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga menciptakan peluang bagi pembangunan ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor produktif di Indonesia. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan juga harus diperhatikan, agar proyek-proyek tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem atau masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.

Dalam rangka memastikan bahwa kerja sama BRI ini memberikan manfaat jangka panjang, Indonesia juga perlu memperkuat kapasitas diplomasi luar negeri untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok. Diplomasi yang lebih proaktif dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar, teknologi yang lebih maju, dan peluang investasi yang lebih luas. Namun, Indonesia juga harus memiliki posisi yang kuat dalam negosiasi untuk memastikan bahwa kerja sama ini berlangsung dengan prinsip saling menguntungkan. Diplomasi ekonomi yang efektif akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional, menjadikan Indonesia sebagai mitra yang lebih dihormati dan diandalkan dalam hubungan bilateral dengan Tiongkok.

Secara keseluruhan, kerja sama Indonesia-Tiongkok dalam kerangka BRI memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, Indonesia harus terus mengembangkan kebijakan yang cermat dan adaptif, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan proyek, serta memperkuat kapasitas domestik untuk mengelola investasi asing secara mandiri. Dengan pendekatan kebijakan yang tepat dan strategi diplomasi ekonomi yang efektif, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BRI untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

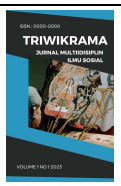

REFERENSI

Books

Nufus, H., Sinaga, L. C., & Song, X., eds. 2024. *Refleksi Satu Dekade Belt and Road Initiative: Peluang dan Tantangan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rakhmat, M. Z., Tarahita, D., Permadi, D. R., Pashya, M. H., Purnama, Y., & Juan, M. F. T. V. 2020. *Ekonomi Politik Hubungan Indonesia-Tiongkok 2020*. INDEF.

Salam, S. 2022. *Keamanan Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Pengadaan Barang dan Jasa dengan Tiongkok*. Jejak Pustaka.

Journal

Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. 2021. "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara." *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 13(1).

Amanda, R. 2021. "Hegemoni Dibalik Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14(1): 34-39.

Cantika, S., Nuzulian, U., Iriansyah, A., Nugrahaningsih, N., & Suratiningsih, D. 2024. "Perkembangan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Tiongkok dalam Kerjasama Meningkatkan Ekspor Crude Palm Oil Tahun 2020-2023." *Jurnal Hubungan Internasional* 17(2).

Malik, Y. I. 2022. "Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Indonesia Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Sentris* 3(1): 74-89.

Mahroza, J., Swastanto, Y., Robby, M. T., Halkis, M., Hermanto, D., Gunawan, R., & David, L. 2024. "Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Membangun Cyber Security."

Nugraha, R. S., & Astri, P. M. 2023. "Perjanjian Kerjasama Bilateral Antara Indonesia Dan China Dalam Perspektif Pembangunan Infrastruktur Negara." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 4(2): 1-16.

Paramitha, G. D. 2024. "Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Belt and Road Initiative: Implikasi terhadap Perdagangan dan Investasi." *Global and Policy Journal of International Relations* 12(2).

Wicaksono, A. P. 2023. "Efektivitas Kebijakan Publik Agreement Pertahanan Indonesia-Tiongkok."

Hidayat, R. N. 2024. "Aktivitas Kerja Sama di Bidang Pertahanan Indonesia–Tiongkok di Era Presiden Joko Widodo."

Rachmayanti, N. 2014. "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China (Tiongkok) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013)". Retrieved August 19, 2016.

Yamin, M., & Windymadaksa, S. 2017. "Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tiongkok." *Jurnal Politik Profetik* 5(2): 200-218.

Thesis/Disertation

Pratama, A. D. 2018. "Kerjasama Indonesia-Tiongkok di Bidang Infrastruktur Pelabuhan Dalam Implementasi One Belt One Road (OBOR) di Indonesia Periode 2015-2017". Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.